

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pembukaan UUD 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha untuk pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahan dan berkelanjutan.

Sasaran dalam pembangunan nasional yang dilakukan yaitu (1) untuk pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, (2) kesejahteraan rakyat, ketahanan budaya dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, (3) mempertahankan persatuan dan kesatuan, membangun sistem politik yang demokratis, (4) mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, serta (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dengan mendorong pembangunan yang ada di masing-masing daerah.

Tujuan utama dari negara-negara miskin yaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua istilah tersebut tidak identik. Pertumbuhan mungkin diperlukan tetapi tidak cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui GNP (*Gross National Product*-Pendapatan Nasional Bruto) atau GNI (*Gross National Income*-Pendapatan Nasional Bruto) yang merupakan total output dari negara tersebut. Pembangunan ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh perubahan dari distribusi output dan struktur ekonomi (Nafziger, 2006)

Pembangunan suatu negara atau wilayah tidak hanya selalu berkaitan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju dan beberapa ekonom, namun perlu juga diperhatikan asas pemerataan dan keberlanjutan, sehingga tujuan pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai. Salah satu tugas pemerintah yaitu untuk mengawal dan memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Namun realistiknya menunjukkan bahwa pembangunan selama ini selalu mengedepankan pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan kemudian mengabaikan makna dari kesejahteraan itu sendiri, yakni pemerataan wilayah. Wilayah yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan antar wilayah.

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada didalamnya. Fungsi dan pengembangan wilayah bila ditinjau dari integrasi nasional adalah untuk membina dan mengefektifkan keterhubungan dan

ketergantungan antar wilayah yang berspesialisasi secara fungsional dan berorientasi pada pasar secara nasional (Aprianoor & Muktiali, 2015)

Pembangunan wilayah yang tidak merata akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun. Sebagaimana yang tertera pada pembukaan UUD 1945, pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum artinya mewujudkan masyarakat yang adil atau tidak timpang.

Ketimpangan antar wilayah merupakan suatu permasalahan yang masih menjadi pembahasan yang menarik. Hal ini dikarenakan permasalahan ini tidak hanya dialami oleh negara Indonesia tetapi dialami juga oleh negara-negara maju lainnya. Ketimpangan antar wilayah sampai sekarang masih menjadi tantangan pembangunan nasional dan saat ini berfokus pada upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketimpangan antar wilayah juga berpotensi menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, tingkat kemiskinan, meningkatnya arus urbanisasi dari wilayah tertinggal ke wilayah maju serta angka kriminalitas.

Ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berdampak pada keseimbangan perputaran kegiatan ekonomi yang berpengaruh pada ketimpangan kemakmuran antar daerah bersangkutan. Terpusatnya kegiatan ekonomi hanya pada suatu wilayah secara langsung berdampak juga pada pendapatan antar daerah. Pusat konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan lebih memberikan pendapatan yang tinggi pula kepada masyarakat sehingga relatif menjadi makmur. Sementara daerah lain yang bukan merupakan pusat

kegiatan ekonomi secara langsung hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah pula sehingga berdampak rendahnya kemakmuran masyarakat.

Ketimpangan pembangunan pada hakikatnya adanya perbedaan geografi dan kandungan sumberdaya alam yang terdapat pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menentukan arah pembangunan menjadi berbeda. Terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan pembangunan yaitu daerah yang menjadi wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tidak stabil dan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya di setiap provinsi yang ada di pulau Sulawesi maka hal tersebut melatarbelakangi untuk melakukan penelitian terhadap masalah ketimpangan wilayah di pulau Sulawesi dengan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar wilayah adalah, yang *pertama* kemiskinan. *Kedua*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Ketiga* Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan wilayah yang tidak merata dan hanya terpusat di wilayah kota di setiap Provinsi sehingga untuk wilayah Kabupaten yang kurang berkembang menambah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. Kesenjangan atau ketimpangan suatu wilayah dapat mempengaruhi pendapatan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Hidup dalam

kemiskinan bukan hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan taraf pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2014).

Tabel 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Pulau Sulawesi Selama Periode Tahun 2011-2020 (dalam persen)

Wilayah se Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (Persen)									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	8,46	7,64	8,50	8,28	8,98	8,20	7,90	7,59	7,51	7,78
Sulawesi Tengah	15,83	14,94	14,32	13,61	14,66	14,45	14,14	14,01	13,48	12,92
Sulawesi Selatan	10,27	9,82	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56	8,99
Sulawesi Tenggara	14,61	13,05	13,73	12,77	12,90	12,88	12,81	11,63	11,24	11,00
Gorontalo	18,02	17,22	18,00	17,41	18,32	17,72	17,65	16,81	15,52	15,22
Sulawesi Barat	13,64	13,01	12,23	12,05	11,90	11,19	11,18	11,22	10,95	11,50
PULAU SULAWESI	13,47	12,61	12,85	12,28	12,81	12,28	12,19	11,69	11,21	11,24

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa presentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi untuk 10 tahun terakhir cenderung menurun. Dapat dibuktikan dari tabel diatas bahwa kemiskinan yang paling tinggi berasal dari Provinsi Gorontalo sedangkan presentase penduduk miskin terendah berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Namun jika dilihat dari keseluruhan rata-rata presentase penduduk miskin di Pulau Sulawesi masih terbilang tinggi.

Menurut Tri (2017:27). Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan IPM menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan wilayah.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi Selama Periode Tahun
2011-2020

Provinsi di Pulau Sulawesi	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93
Sulawesi Tengah	64,27	65,00	65,79	66,43	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55
Sulawesi Selatan	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
Sulawesi Tenggara	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45
Gorontalo	63,48	64,16	64,70	65,17	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68
Sulawesi Barat	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11
PULAU SULAWESI	64,98	65,59	66,16	66,73	67,31	67,91	68,55	69,23	69,93	70,11

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.2, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat 6 wilayah administrasi di Pulau Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo dan yang terakhir Provinsi Sulawesi Barat. Hingga tahun 2020, IPM tertinggi masih dicapai oleh Provinsi Sulawesi Utara. Pada periode yang sama pula capaian terendah ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk atau daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Ketimpangan wilayah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanaman modal memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja terampil (Sjafrizal, 2009).

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi Periode Tahun 2011-2020

Wilayah se Provinsi	PERTUMBUHAN EKONOMI									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	5,73	6,21	6,29	6,16	5,63	5,91	6,09	5,95	5,50	- 0,93
Sulawesi Tengah	8,46	8,39	17,38	5,24	13,31	9,44	6,68	16,55	7,82	4,62
Sulawesi Selatan	7,44	7,89	7,29	7,29	6,85	6,98	6,84	6,52	6,41	- 0,80
Sulawesi Tenggara	9,65	10,28	7,10	5,96	6,53	6,37	6,49	5,96	6,10	- 0,66
Gorontalo	7,23	7,30	7,33	7,35	6,74	6,89	6,91	6,54	6,50	- 0,02
Sulawesi Barat	9,75	8,62	13,59	8,36	6,86	5,96	6,23	5,56	5,28	-1,85
PULAU SULAWESI	8,04	8,12	9,83	6,73	7,65	6,93	6,54	7,85	6,27	0,06

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada tabel 1.3 pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi untuk 10 tahun terakhir tidak stabil atau naik turun. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi untuk setiap Provinsi di Pulau Sulawesi masih berada di bawah angka 10 persen.

Pertumbuhan ekonomi bahkan seringkali juga dibarengi dengan adanya ketimpangan dalam pembangunan. Terdapat tiga aspek ketimpangan yang paling jelas terlihat adalah pada aspek spasial yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah tertinggal, aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan golongan miskin, aspek sektoral yang menimbulkan adanya sektoral unggulan dan non-unggulan.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun beberapa masalah yang perlu diidentifikasi terkait beberapa variabel yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, sebagai berikut:

1. Menurut presentase penduduk miskin paling banyak yaitu berada di Provinsi Gorontalo yang seluruhnya diatas 10 persen dan yang paling sedikit berada di Provinsi Sulawesi Utara untuk posisinya berada di bawah 10 persen.
2. Melihat data Indeks Pembangunan Manusia untuk 5 tahun terakhir, yang rata-rata setiap tahunnya meningkat dan berada di level sedang dan level tinggi.
3. Menurut presentase Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak stabil atau naik turun setiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan setiap Provinsi di Pulau Sulawesi?
2. Seberapa besar pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi?
3. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi?
4. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi?

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan wilayah Kabupaten/Kota yang ada di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi
2. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi
4. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap ketimpangan wilayah di setiap Provinsi di Pulau Sulawesi.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi dan referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya serta sebagai bahan kepustakaan dan sumber pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait pengaplikasian teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.